

Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara

Alam Sabdani

alamsabda2708@gmail.com

Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si

dgmanar@gmail.com

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Jawa Tengah

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang

ABSTRAK

Sampah merupakan material sisa makhluk hidup yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cair ataupun gas. Sampah harus dikelola dengan benar agar terhindar dari dampak buruk sampah. Pemerintah Kabupaten Jepara saat ini dalam menangani permasalahan sampah melakukan pengelolaan sampah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 atau biasa disebut Jakstrada Pengelolaan Sampah. Di dalam Jakstrada tersebut terdapat program-program dari Jakstrada pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang saat ini masih belum berjalan sesuai rencana Jakstrada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah Jakstrada Kabupaten Jepara. Pendekatan penelitian ini kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Analisis kualitatif dikuatkan dengan data.

Penelitian ini menemukan bahwa Jakstrada dalam pengelolaan sampah yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara belum berjalan sesuai rencana karena ada permasalahan diproses manajemennya. Permasalahan ditahapan perencanaan Jakstrada yang kurang matang dan target yang terlalu tinggi. Permasalahan ditahapan pengorganisasian yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya manusia untuk menjalankan program-program Jakstrada. Ditahapan pelaksanaan, beberapa program Jakstrada tidak berjalan karena imbas dari buruknya pengorganisasian dan adanya hambatan-hambatan yang didapatkan selama proses manajemen program-program Jakstrada.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara belum berjalan dengan benar, karena dalam tahapan manajemennya masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Karena hal tersebut yang membuat pengelolaan sampah saat ini belum berjalan sesuai rencana Jakstrada. Selain itu, dalam pengelolaannya juga mengalami berbagai hambatan. Peneliti menyarankan manajemen pengelolaan

sampah yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara belum berjalan dengan benar, karena dalam tahapan manajemennya masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Karena hal tersebut yang membuat pengelolaan sampah saat ini belum berjalan sesuai rencana Jakstrada. Selain itu, dalam pengelolaannya juga mengalami berbagai hambatan.

Kata kunci : Jakstrada, Permasalahan, Program, Pengelolaan sampah

ABSTRACT

Garbage is a material of residual living creature that is not used anymore and released to nature in the form of solids, liquids or gases. Trash must be managed properly to avoid the bad effects of garbage. Jepara Regency Government is currently in dealing with garbage problems doing waste management by issuing the rule of Regent No. 46 year 2018 or commonly called Jakstrada waste management. In Jakstrada, there are programs from the garbage management Jakstrada which is run by the Environment Department of Jepara District which is still not yet running according to the plan Jakstrada. This research aims to know the management of waste management of Jakstrada District Jepara. This research approaches qualitative descriptive. Data collected with the technique of wawancara. Qualitative analysis is strengthened with data.

This study found that Jakstrada in the waste Management run Environment Office of Jepara District has not walked as planned because there is a problem of processing management. The problem of the undercooked Jakstrada planning and the target is too high. The issue of organizing is the lack of budget and human resources to run Jakstrada programs. In the implementation, some Jakstrada programs did not run because of the poor organizing and the obstacles that were asked during the management of Jakstrada programs.

The conclusion that can be withdrawn from this research is the management of waste management that is currently done by the government of Jepara district has not run properly, because in the stages of management there are still shortcomings and mistakes. Because of this that makes the management of waste is not currently running according to Jakstrada plan. In addition, in its management it also experiences sharing barriers. Researchers suggest management of waste management that is currently done by the government of Jepara district has not been running properly, because in the stage of management there are still shortcomings and mistakes. Because of this that makes the management of waste is not currently running according to Jakstrada plan. In addition, in its management it also experiences sharing barriers.

Keywords: Jakstrada, Problems, Program, waste management

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Sampah merupakan material sisa makhluk hidup manusia, hewan maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cair ataupun gas. Secara umum sampah dibagi menjadi 2 jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah padat ialah hasil sisa dari manusia berupa zat padat dan sampah cair hasil sisa manusia berupa zat. Sampah merupakan ancaman utama kehidupan umat manusia dimasa yang akan mendatang. Selain itu pertumbuhan penduduk juga sangat mempengaruhi besarnya produksi sampah di sebuah daerah, karena penduduk daerah tersebut akan menghasilkan sampah dari proses kehidupannya secara terus menerus setiap harinya.

Sejalan dengan fenomena munculnya permasalahan sampah, Kabupaten Jepara juga tengah mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk, perkembangan tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya. Selain itu diperparah juga dengan buruknya perilaku masyarakat Kabupaten Jepara dalam mengelola sampah. Dengan adanya permasalahan sampah tersebut yang dinilai dapat memicu permasalahan besar dari sampah, Pemerintah Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mencegah munculnya permasalahan sampah. kebijakan tersebut tertuang didalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai kebijakan penanggulangan permasalahan sampah di Kabupaten Jepara. Melalui Jakstrada pengelolaan sampah tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara berencana menargetkan upaya pengelolaan sampah dengan cara pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% yang harus dicapai oleh Kabupaten Jepara pada tahun 2025. Jakstrada tersebut nantinya diturunkan menjadi program-program yang nantinya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaannya sejauh ini, program-program Jakstrada saat ini mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut sangat menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses manajemen pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Penelitian ini menjadi penting karena melalui penelitian ini akan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengelolaan sampah tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu penelitian ini juga untuk Mengidentifikasi pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara Yang tidak sesuai rencana dan Menjelaskan faktor yang menghambat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Bapak Karwadi selaku kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Bapak Lulut Andi Ariyanto selaku Kepala Seksi Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Ibu Windi Novia RW selaku pegawai Bidang Ekonomi, Prasana dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Jepara.

III. KERANGKA TEORI

Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, bahwa manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari sebuah kata kerja *to manage* yang berarti kontrol. Secara harfiah, manajemen bisa diartikan sebagai mengelola, menangani ataupun mengendalikan. Sedangkan menurut Menurut G.R. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen Fungsi Perencanaan (*Planning*), Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*), Fungsi Penggerakan (*Actuating*), Fungsi Pengawasan (*Controlling*).

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada dasarnya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (doing right things) secara *efficient* (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2011: 159).

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), adalah :

1. Perencanaan pemerintahan adalah hal yang dilakukan untuk menetapkan tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan adalah realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai secara efektif dan efisien.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan adalah hal yang dilakukan semata-mata untuk menjalankan sumber-sumber pemerintahan supaya mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya.
4. Kontrol pemerintahan adalah hal yang dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Manajemen Pelaksanaan Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara

Proses manajemen pelaksanaan Jakstrada pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintah, penggunaan sumber-sumber pemerintah hingga kontrol pemerintah.

- A. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup mencakup perencanaan Jakstrada dan perencanaan program-program dari Jakstrada. Dalam perencanaan program Desa mandiri sampah, nantinya program tersebut berbasis di desa dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan pengurangan sampah dari sumbernya langsung. Sumberdaya anggaran dan pekerja di program desa mandiri sampah berasal dari pihak desa. Selanjutnya dalam perencanaan program Siangsa, nantinya program ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak luar dalam pengelolaannya karena program ini berbasis teknologi aplikasi dimana hal tersebut harus dikelola oleh tim ahli. Program yang nantinya diharapkan mempermudah pengelolaan sampah karena berbasis teknologi. Sumber daya anggaran dan pekerja nantinya direncanakan tidak sepenuhnya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup melainkan kerjasama dengan pihak ketiga dan juga untuk anggaran mencari dana CSR dan sebagainya. Yang terakhir perencanaan program Jepapah, program ini nantinya dijalankan sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program ini memiliki model penjemputan sampah ke tiap-tiap wilayah layanan program yang berbasis diwilayah pemukiman perkotaan dan tempat-tempat usaha. Dalam perencanaannya, sumber daya anggaran dan pekerja sepenuhnya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
- B. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kepada 3 program yaitu dalam pembagian sarana prasarana, sumber daya pekerja dan sumber daya anggaran program. Pengorganisasian sarana prasarana dan pekerja untuk program Jepapah yakni mendapatkan jatah personel sebanyak 19 dan juga 3 unit mini dump dan 5 unit motor dump/tossa. Untuk program Siangsa mendapatkan personel sebanyak 9 orang dan juga 3 unit motor dump/tossa dan 1 unit mini dump. Beda halnya dengan pengorganisasian sumber-sumber pemerintah yang ada pada program Desa mandiri sampah, Pengorganisasian program Desa Mandiri Sampah berbeda karena program tersebut berbasis masyarakat, jadi pelaksanaan program tidak dilakukan oleh personel dari

Dinas Lingkungan Hidup melainkan dijalankan oleh desa sendiri, akan tetapi setiap desa harus memiliki pendamping yang mendampingi keberjalanan program. Pendamping tersebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pengalokasian anggaran program-program, Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan anggaran dinas secara khusus kepada program Jakstrada. Dinas hanya mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang diajukan oleh Bidang Persampahan Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan kegiatannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara melakukan berbagai cara dengan salah satunya mencari dana CSR dari perusahaan di wilayah Kabupaten Jepara. Hasilnya saat itu mendapatkan dana melalui CSR yang digunakan untuk program Siangsa akan tetapi dana yang didapatkan masih kurang untuk menjalankan program Siangsa. Selain itu hal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan menekan pemerintah daerah maupun pemerintah desa membuat atau merubah Perda dan Perdes tentang pengelolaan sampah.

C. Dalam pelaksanaan Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sebagai pelaksana Jakstrada menjalankan dengan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Sampah dilaksanakan di awal tahun 2019 dengan diadakannya sosialisasi seminar dan pelatihan tentang pengelolaan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu selama tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan lokakarya pengelolaan sampah dan Sosialisasi dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Sejauh pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah, Sampai saat ini dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sudah ada 5 desa yang menjalankan program tersebut yaitu, Desa Mantingan, Desa Suwawal Timur, Desa Rajek wesi, dan 2 desa rintisan yaitu Desa Sekuro dan Desa Jugo.

Pelaksanaan program Siangsa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan ditahun 2018. Pelaksanaan ini meliputi

tahapan perencanaan, pembuatan program dan pengembangan aplikasi Siangsa tersebut. Akan tetapi Secara keseluruhan sampai saat ini prgram Siangsa belum berjalan karena ada beberapa hal permasalahan yang mengakibatkan Siangsa belum terlaksanakan permasalahan paling besar adalah pengembangan dan pembiayaan. Pengembangan aplikasi dan penyempurnaan layanan memerlukan baiaya yang sangat besar, pemeliharaan sistem aplikasi dan pemberian honor kepada tim khusus yang menjalankan sistim juga menjadi permasalahan. Akan tetapi belum berjalannya program Siangsa bukan berarti Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan apa-apa. Pihak dinas telah meluncurkan Aplikasi Siangsa di Playstore, membuat *Website* Siangsa dan melakukan promosi melalui akun media sosial Siangsa selama kurun waktu 1 tahun sampai mulai pertengahan tahun 2018 hingga 2019.

Pelaksanaan program Jepapah. Dari 3 program Jastrada program Jepapah lah yang bisa dibilang dalam pelaksanaannya tetap berjalan dan mengalami kemajuan hingga saat ini. Jepapah saat ini berjalan sesuai rencana yang di harapkan. Sampai saat ini Ada sekitar 4 kelurahan yang telah terlayani, Selain itu ada sekitar 8 Hotel yang terlayani Sedangkan restoran, ada sekitar 9 restoran yang sudah terlayani. Hingga saat ini Program Jepapah bisa dibilang berjalan sesuai rencana, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga mengalami kekurangan. Kekurangan tersebut berada pada jumlah personel dan kendaraan angkut yang masih kurang. Karena kekurangan tersebut membuat perluasan wilayah pelayanan perkembangannya kurang cepat.

- D. Proses kontrol pemerintah dalam Jakstrada sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara bersama dengan BAPPEDA Kabupaten Jepara. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pengawasan terhadap kinerja Seksi Persampahan dan Kebersihan dalam pelaksanaan Jakstrada. Maka pertanggungwaban pelaksanaan dilakukan oleh para personel kepada pimpinan Seksi

Persampahan dan Kebersiahan. Selanjutnya dari Seksi Persampahan dan Kebersiahan memberikan laporan pengawasan kepada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ataupun pimpinan Dinas Lingkungan Hidup. Pelaporan Jakstrada dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun selain itu Seksi Persampahan dan Kebersiahan juga melakukan pembaharuan perkembangan pelaksanaan program-program setiap bulan. Melalui laporan tersebut dan pengawasan secara langsung oleh pimpinan Seksi Persampahan dan Kebersiahan dapat dilihat apakah ada permasalahan atau hambatan yang didapatkan oleh program-program Jakstrada.

Hambatan yang ada dalam Manajemen Jakstrada Pengelolaan Sampah Kabupaten Jepara

Ada dua hambatan yang dalam pelaksanaan Jakstrada, yaitu hambatan yang berasal dari Internal pemerintah dan Eksternal pemerintah, yang berarti dari dalam dan dari luar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Hambatan Internalnya ialah adalah pada sumber daya anggaran dan sumber daya pekerja. Hal tersebut terjadi karena anggaran dan SDM yang kurang yang mengakibatkan beberapa program tidak berjalan sesuai rencana. Sumber daya menjadi hambatan karena sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup saat ini belum bisa menjalankan program sesuai rencana. Sedangkan Hambatan Eksternalnya adalah mulai dari masih minimnya kepedulian dari pihak pemerintah desa terhadap program Desa Mandiri Sampah, Selanjutnya belum adanya Perdes dari pihak pemerintah desa menjadi kendala dimana program Desa Mandiri Sampah tidak berjalan secara masif seperti yang direncanakan karena tidak adanya dukungan pemerintah desa melalui dibuatnya Perdes tentang pengelolaan sampah secara mandiri. Hambatan lainnya adalah tingkat kepedulian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian telah dilakukan dan juga telah di jabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara belum berjalan sesuai rencana Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena dalam manajemen pelaksanaan Jakstrada mengalami permasalahan ataupun kekurangan dalam manajemennya, serta pula disebabkan adanya hambatan yang didapat selama pelaksanaan tersebut. Mulai dari perencanaan yang kurang matang dan terlalu tinggi dalam menentukan target sampah yang terkelola. Didalam pengorganisasian mengalami permasalahan dimana pembagian Sumbeday pemerintah terkhusus anggaran sangat sedikit dan belum bisa menjalankan program-program Jakstrada. Selanjutnya didalam eksekusi pelaksanaan mengalami permasalahan dimana beberapa program tidak berjalan yang diakibatkan karena kurangnya anggaran program.
2. hambatan yang didapat selama pelaksanaan terbagi dalam dua aspek yaitu, aspek Internal mengalami hambatan karena kurangnya anggaran program dan target yang terlalu tinggi. Sedangkan hambatan aspek Eksternal mengalami permasalahan yaitu kurangnya dukungan masyarakat dan pemerintah desa terhadap keberjalanan program-program Jakstrada.

Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Jakstrada dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Jepara sebagai pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Jepara maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. manajemen pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara belum berjalan dengan benar, karena dalam tahapan manajemennya masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Karena hal tersebut yang membuat pengelolaan sampah saat ini belum berjalan

sesuai rencana Jakstrada. Selain itu, dalam pengelolaannya juga mengalami berbagai hambatan.

2. Koordinasi antara OPD juga lebih di kuatkan mengingat permasalahan sampah bukan permasalahan satu instansi melainkan permasalahan bersama.

3. Untuk masyarakat Kabupaten Jepara harus mendukung program-program pemerintah Kabupaten Jepara terlebih dalam pengelolaan sampah, karena nantinya yang paling merasakan dampak dari suksesnya program juga masyarakat sendiri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

George, R. T. (2013). *Dasar-dasar Manajemen, Cetakan Kesebelas*., Jakarta: PT Bumi.

Ndraha, T. .. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Graha Aksara